

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 15
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; serta
6. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. Kajian stok ikan di WPP;
2. Pemanfaatan sumber daya ikan di WPP dengan sistem kuota;
3. Pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perijinannya; dan
4. Benda berharga asal muasal kapal yang tenggelam.
- Ketua Rapat : Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 38 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal);
2. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
3. Dr. TB Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);

4. Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);
5. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan); dan
6. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas Kajian stok ikan di WPP, Pemanfaatan sumber daya ikan di WPP dengan sistem kuota, Pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perijinannya, dan Benda berharga asal muasal kapal yang tenggelam, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan sejak dini agar sumber daya sektor kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkampanyekan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan secara optimal berdasarkan potensi lestari hasil Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dengan menjamin adanya kepastian hukum (regulasi) melalui pendekatan pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat ataupun kemitraan dengan swasta secara efektif, efisien, dan akuntabel guna menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat kelembagaan Komnas Kajiskan.

3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan regulasi tentang Penangkapan Ikan Terukur agar ada kepastian usaha di sektor kelautan perikanan sehingga proses pelayanan administrasi perizinan kapal dapat segera diimplementasikan sesuai dengan peruntukan pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat menggunakan kembali anggaran *Automatic Adjustment* Tahun 2022 dalam rangka menjalankan program dan kegiatan prioritas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Antam Novambar

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Anggia Erma Rini, MKM.

A-41